

THE EFFECT OF BUDGET TARGET CLARITY, INTERNAL CONTROL ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF THE JAMBI CITY GOVERNMENT WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A MODERATING VARIABLE

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN KOTA JAMBI (KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI)

Oleh:

Indra Kharisma P¹⁾ Sri Rahayu²⁾ Yudi³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, bekerja di Pemkot Jambi – Indonesia

^{2&3)} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

Email : indrakharismaputra.ik@gmail.com¹⁾ , sri_rahayu@unja.ac.id²⁾ , yudi_fe@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget target clarity, internal control on the performance accountability of the Jambi City Government with organizational commitment as a moderating variable. This research is included in quantitative research. The population of this research is employees who work in Jambi City Government agencies, where the sample in this study is the Head of OPD, Head of the Planning and Evaluation Subdivision and Financial Administration Officer (PPK) within the Jambi City government agency, amounting to 72 respondents. The data used in this study is primary data. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis and MRA with the help of SPSS version 23 program. The results showed that the clarity of budget targets and internal control had a positive effect either simultaneously or partially on the accountability of government performance. Organizational commitment as a moderating variable can moderate the relationship between clarity of budget targets and government performance accountability, while organizational commitment cannot moderate the relationship between internal control and government performance accountability.

Keywords: The effect of budget target clarity, internal control on the performance accountability of the Jambi City Government with organizational commitment as a moderating variable.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Jambi, di mana sampel dalam penelitian adalah Kepala OPD, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan instansi pemerintah Kota Jambi yang berjumlah 72 responden. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan MRA dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kata kunci: Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia saat sekarang ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan ditandai dengan keinginan meningkatnya akan akuntabilitas dan transparansi sebuah kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi adalah cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkapkan dalam *good governace*. Ungkapan pemerintahan yang sangat bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama dua puluh tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan dimasa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi Bastian (2010).

Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi kritikan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat selalu mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan serta produk dan jasa lainnya yang berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Hingga kini, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelayanan publik yang jauh dari harapan.

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik Akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik Mardiasmo (2018).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah perwujudan kewajiban dalam instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dari sebuah organisasi dalam mencapai sebuah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan srategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

integrasi dari berbagai aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem pengukuran dan sistem pelaporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan sebuah penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada emerintahan Kota Jambi. Jambi dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Jambi hanya mampu meraih nilai 45,11 termasuk dalam predikat C (Kurang), pada tahun 2014 Pemerintah Kota Jambi mengalami kenaikan sebesar 48,29 namun masih dalam predikat C (Kurang), Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Jambi juga mengalami kenaikan sebesar 50,19 terjadi peningkatan dalam predikat CC (Cukup), selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan nilai sebesar 50,71 dan masih pada predikat CC (Cukup), akan tetapi pada priode berikutnya Pemerintah Kota Jambi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu meraih nilai sebesar 60,1 dengan predikat B (Baik), pada tahun 2018 sebesar 62,99 dan termasuk dalam predikat B (Baik), dan disusul pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi mampu meraih nilai tertinggi sebesar 65,02 dengan predikat yang sama yaitu B (Baik).

Melihat dari Trend Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terjadi peningkatan pada setiap tahunnya namun masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari perolehan range nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meningkat pada setiap tahunnya namun masih belum mampu merubah predikat yang diberikan oleh KemenPAN&RB. Melihat hal tersebut adanya peningkatan namun tidak signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
4. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?
5. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap

akuntabilitas kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.

2. Untuk membuktikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
3. Untuk membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
4. Untuk membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.
5. Untuk membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan Kota Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas Kinerja

Bastian (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu istilah dari bahasa Inggris yaitu *accountability* berarti sebuah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu kunci untuk terwujudnya *good governance* dalam mengelola organisasi publik. Akuntabilitas kinerja juga menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan dalam organisasi, karena organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Dengan sasaran anggaran yang jelas, maka mempermudah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran

secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya Azmi *et al.* (2014).

2.3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian yang harus di terapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kualitas dalam laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula Fitriwati *et al.* (2017). Pengendalian internal menjadi bagian dari manajemen yang selalu berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi operasi, daya andal pelaporan keuangan serta kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur pada sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

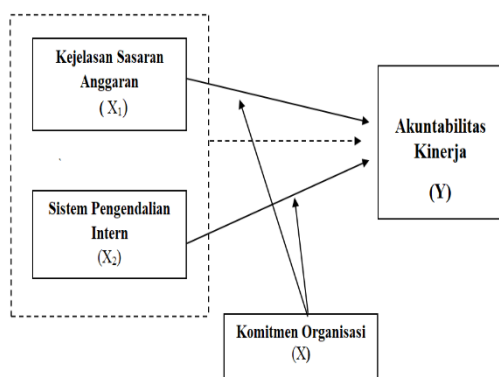
2.4. Komitmen Organisasi

Gibson *et al.* dalam Priansa (2014) telah menyatakan bahwa komitmen organisasional melibatkan tiga sikap yaitu identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan keterlibatan dengan tugas-tugas organisasi, dan perasaan loyalitas terhadap organisasi. Sopiah (2008) mengemukakan bahwa ada tiga komponen komitmen organisasi yaitu *Affective commitment*, *Continuance commitment* dan *Normative commitment*.

1. *Affective Commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional.
2. *Continuance Commitment*, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.
3. *Normative Commitment*, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

2.5. Model Penelitian

Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 1. Model Penelitian

2.6. Hipotesis Penelitian

- H₁ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan.
- H₂ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan.
- H₃ : Diduga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan.
- H₄ : Diduga Komitmen Organisasi Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan.
- H₅ : Diduga Komitmen Organisasi Memoderasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Sedangkan subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Objek dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi, sedangkan subjek dalam penelitian ini yaitu kepala OPD, kasubbag perencanaan dan evaluasi dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dilingkungan instansi pemerintah Kota Jambi.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari badan dan dinas yang berada dalam lingkungan pemerintahan Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan

dengan *purposive sampling*. Kuesioner diberikan kepada responden yang memiliki fungsi yang lebih kompleks dalam proses perencanaan sampai dengan pengendalian mengenai anggaran yang akan mempengaruhi sebuah kinerja instansi pemerintah daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri atas badan dan dinas sebanyak 24 OPD pada instansi Pemerintah Kota Jambi. Adapun responden yang diberikan kuesioner adalah Kepala OPD, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dilingkungan instansi pemerintah Kota Jambi yang berjumlah 72 (Tujuh Puluh Dua).

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel Independen yaitu (kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian Intern) dan variabel dependen (akuntabilitas kinerja pemerintah) dan satu Variabel Moderasi yaitu Komitmen Organisasi.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kejelasan Sasaran Anggaran	1.Tujuan 2.Kinerja 3.Standar 4.Jangka waktu 5.Sasaran prioritas 6.Tingkat kesulitan 7.Koordinasi Locke dan Latham (1984)	Interval
Sistem Pengendalian Intern	1.Lingkungan pengendalian 2.Penilaian resiko 3.Kegiatan pengendalian 4.Komunikasi dan informasi 5.Pemantauan pengendalian intern (PP RI Nomor 60 tahun 2008)	Interval
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Pelaporan Kinerja 4.Evaluasi Internal 5.Capaian Kinerja Permen PAN dan RB No 12 Tahun (2015)	Interval
Komitmen Organisasi	1.Affective Commitment 2.Continance Commitment 3.Normative Commitment Sopiah (2008)	Interval

Sumber: Data diolah (2021)

3.4. Skala Pengukuran

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan bentuk penyebaran kuesioner dan skala yang digunakan adalah kuisisioner yang menggunakan skala Likert. Skala Likert pada penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban.

3.5. Model Analisis

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai ketiga dalam sebuah penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variable independen (kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Data yang telah diperoleh

kemudian diolah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan program SPSS, dengan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$\text{Rumus : } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja
- a = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- X₁ = Kejelasan sasaran anggaran
- X₂ = Sistem pengendalian intern
- e = Error

Pada hipotesis keempat sampai kelima menggunakan variabel moderating untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan uji interaksi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Moderated Regression Analysis* (MRA) Adapun; *Moderated Regression Analysis* (MRA) dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 \cdot X_3) + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_5 (X_2 \cdot X_3) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- a = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$ = Koefisien regresi
- X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X₂ = Sistem Pengendalian Intern
- X₁ · X₃ = Interaksi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Komitmen Organisasi
- X₂ · X₃ = Interaksi Pengendalian Intern dengan Komitmen Organisasi
- ε = Error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan jumlah dari kuesioner yang didistribusikan adalah 72 kuesioner atau 24 OPD yang menjadi sampel penelitian. Terdapat beberapa OPD yang tidak mengembalikan kuesioner. Dengan demikian jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 64 kuesioner atau sebesar 88,88 % kuesioner yang kembali.

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel yang dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Range	min	max	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	64	8	27	35	32,97	2,100

Pengendalian Intern	64	10	35	45	42,31	2,462
Komitmen Organisasi	64	15	30	45	35,81	3,833
Akuntabilitas Kinerja	64	8	27	35	33,00	1,935
Valid N (listwise)	64					

Sumber : Output SPSS (2021)

1. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 27 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 35 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban kejelasan sasaran anggaran adalah 32,97.
2. Pada variabel pengendalian intern diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 35 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 45 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban pengendalian intern adalah 42,31.
3. Pada variabel komitmen organisasi diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 30 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 45 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban komitmen organisasi adalah 35,81.
4. Pada variabel akuntabilitas kinerja diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 27 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 35 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban akuntabilitas kinerja adalah 33,00.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2016) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov-Smirnov test dengan kriteria pengujian α 0,05 sebagai berikut: a. Jika sig ≥ α berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal b. Jika sig ≤ α berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,38696890
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,076
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui nilai *asympt.sig* sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat kemiripan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam suatu model, untuk mengetahuinya digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. dengan kriteria kriteria jika $VIF > 10$, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya, sedangkan jika $VIF < 10$ maka variabel bebas tidak mempunyai persoalan multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KSA	,626	1,598
	PI	,698	1,432
	KO	,781	1,281

a. Dependent Variable: AKP

Sumber : Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua varibel independen memiliki nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

4.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji Park merupakan salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas pada sebuah data pada variabel didalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (LnU²i). Tujuan dilakukan Uji Park adalah untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Dimana dalam pengujiannya dilakukan melalui regresi antara variabel bebas dengan error.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,191	4,209		1,233	,222
	KSA	-,151	,134	-,179	-1,129	,264
	PI	-,078	,108	-,108	-,720	,474
	KO	,079	,066	,170	1,196	,236

a. Dependent Variable: LnRes_2

sumber : Output SPSS (2021)

Pada tabel di atas pengujian dilakukan dengan SPSS dengan melihat nilai signifikansi jika > 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam penelitian, dan bila signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Maka dapat di simpulkan bahwa nilai signifikansi dari tabel di atas > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikan atau positif secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamasama antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali,2016).

Tabel 6. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107,245	2	53,622	25,405	,000 ^b
	Residual	128,755	61	2,111		
	Total	236,000	63			

a. Dependent Variable: AKP

b. Predictors: (Constant), PI, KSA

Sumber : Output SPSS (2021)

Dari *output* ANOVA hasil analisis regresi berganda tersebut dapat dilihat tingkat signifikan sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Tingkat Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan dapat disimpulkan H1 dapat diterima.

4.3.2. Uji T

Hasil uji t dapat dilihat besarnya *P-value* dibandingkan dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak, itu berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Jika propabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali,2016).

Tabel 7. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.461	3.447		2.454	.017
	KSA	,299	,103	,324	2.887	.005
	PI	-,347	,088	-,442	-3.932	.000

a. Dependen Variabel: AKP

Sumber : Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas maka hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis 2, nilai signifikan variabel kejelasan

sasaran anggaran dengan signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a dan dapat dinyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan dapat disimpulkan H2 diterima.

2. Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis 3, nilai signifikan variabel pengendalian intern dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan menolak H_a dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan dapat disimpulkan H3 diterima.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R²* pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.454	.437	1.45284

a. Predictors: (Constant), PI, KSA

b. Dependent Variable: AKP

Sumber : Output SPSS (2021)

Pada tabel di atas dapat dilihat diperoleh nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R²*) sebesar 0,437 (43,7 %) artinya bahwa sumbangan pengaruh dari semua variabel independen kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja sebesar 43,7 % sedangkan 56,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.3.4. Uji Moderasi

Pada uji statistik peneliti menguji variabel moderating yaitu komitmen organisasi apakah dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja. Pada uji ini penelitian menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan uji interaksi dengan persamaan 1:

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 \cdot X_3) + \varepsilon$$

Tabel 9. MRA Kejelasan Sasaran Anggaran

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	77,218	28,777		2,683	,009
	KSA	-1,257	,872	-1,364	-1,441	,155
	KO	-1,835	,832	-3,634	-2,205	,031
	KSA_KO	,053	,025	4,743	2,121	,038

a. Dependent Variable: AKP

Sumber : Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas uji statistik, koefisien regresi (beta) 0,053 dengan nilai signifikan = 0,038. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikansi <

0,05 maka disimpulkan komitmen organisasi mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H4 diterima. Interaksi persamaan 2:

$$Y_2 = a + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_5 (X_2 \cdot X_3) + \varepsilon$$

Tabel 10 MRA Sistem Pengendalian Intern
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-43,594	34,300		-1,271	,209
	PI	1,825	,800	2,321	2,283	,026
	KO	1,539	,954	3,049	1,614	,112
	PI_KO	-,037	,022	-4,024	-1,659	,102

a. Dependent Variable: AKP

Sumber : Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas uji statistik, koefisien regresi (beta) -0,037 dengan nilai signifikan = 0,102. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikan > 0,05 dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H5 ditolak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil uji statistik yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja terbukti melalui uji hipotesis. hasil analisis regresi berganda tersebut dapat dilihat tingkat signifikan sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan tingkat kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima.

4.4.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil uji statistik menunjukkan kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikan 0,005 lebih dari kecil $\alpha = 0,05$ dan Dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a dan dapat dinyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan dapat disimpulkan H2 diterima artinya ketika penyusunan anggaran dilaksanakan dengan baik dan jelas serta dapat dimengerti maka akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi juga dapat tercapai dengan baik.

Pada variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 27 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 35 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban kejelasan sasaran anggaran adalah 32,97 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan kejelasan sasaran anggaran dengan cukup baik.

Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kejelasan sasaran anggaran dengan cukup baik yang mana dalam pelaksanaannya di instansi pemerintah Kota Jambi anggaran yang telah disusun berdasarkan rancangan kerja jangka menengah (RPJMD) yang berisi tentang penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan penyusunan anggaran juga merujuk kepada renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang di lakukan oleh Ali Zakyudin (2015), Anjarwati (2012), Heptariani *et al.* (2013), Hafiz (2017), Priatna *et al.* (2018), Kusumaningrum, (2010), Fitrawati *et al.* (2017), dan Manullang *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

4.4.3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil uji statistik menunjukkan pengendalian intern memiliki tingkat signifikan 0,000 lebih dari kecil $\alpha = 0,05$ dan Dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan dapat disimpulkan H_3 diterima artinya semakin besar keterlibatan dan kepedulian dalam pelaksanaan pengendalian intern maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Jambi.

Pada variabel pengendalian intern diketahui bahwa total skor terendah dari jawaban responden adalah 35 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 45 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban pengendalian intern adalah 42,31 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dapat memahami dan mengerti bagaimana dalam pelaksanaan pengendalian intern dengan cukup baik.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang di lakukan oleh Fitrawati *et al.* (2017), Silalahi (2017) dan Manullang *et al.* (2019) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

4.4.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan uji statistik, koefisien regresi (beta) 0,053 dengan nilai signifikan = 0,038. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai signifikan < 0,05 dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H_4 diterima.

Adanya komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi maka semakin tinggi pula tercapainya ketepatan sasaran anggaran OPD Pemerintah Kota Jambi. Hal ini disebabkan karena pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap

organisasi (instansi) pemerintah daerah maka akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Sehingga komitmen pegawai berimplikasi pada pembuat anggaran untuk bekerja mencapai target anggaran yang ditentukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang di lakukan oleh Hafiz (2016), Dewi *et al.* (2017) dan Silalahi (2017) penelitian ini menunjukkan komitmen organisasi merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

4.4.5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengendalian Intern Dengan Akuntabilitas Kinerja

Pada uji statistik, koefisien regresi (beta) -0,037 dengan nilai signifikan = 0,102. Berdasarkan hasil olah data dimana perolehan nilai signifikan > 0,05 dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja dapat diartikan H_5 ditolak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang di lakukan oleh Dewi *et al.* (2017) menyatakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan komitmen organisasi dengan pengendalian internal.

Ketidakkampuan komitmen organisasi dalam memoderasi pengendalian intern pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya komitmen organisasi pada diri masing-masing terhadap pengendalian intern. Komitmen organisasi dikatakan dapat mempengaruhi atau memperkuat pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja apabila seorang pegawai yang berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasinya sehingga akan mempengaruhi tindakan dan kerjanya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara bersama-sama dalam penerapan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi disimpulkan bahwa H_1 diterima. Sistem pengendalian intern dilakukan untuk dapat menjaga agar aktivitas organisasi tetap mengarah kepada tujuan organisasi. Adanya sistem pengendalian intern di Pemerintahan Kota Jambi yang baik maka dapat mengatasi kecurangan serta diharapkan sistem pengendalian intern dapat mengendalikan proses penganggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Jambi pada setiap OPDnya

- dengan artian jika kejelasan sasaran anggaran dilaksanakan secara baik dan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Jambi ditingkatkan maka diharapkan akan mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pula karena akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran baik kegiatan maupun anggaran.
- Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Ketika kejelasan sasaran anggaran tinggi maka anggota organisasi dapat mengetahui dengan jelas apa yang akan mereka lakukan sehingga pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan lancar dan membuat akuntabilitas kinerja menjadi tinggi.
 - Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Pada dasarnya, usaha untuk meningkatkan dan membangun sistem pengendalian intern, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi. Untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Jambi perlu diciptakannya sebuah sistem pengendalian intern, Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan sebuah keyakinan organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja Pemerintah Kota Jambi.
 - Adanya interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi yang artinya komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.
 - Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:

- Untuk Pemerintahan Kota Jambi disarankan agar dapat lebih memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal begitu juga komitmen organisasi dalam menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Selain itu juga Pemerintah Kota Jambi agar lebih optimal dan konsisten dalam meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) untuk meningkatkan nilai SAKIP karena akuntabilitas kinerja menjadi salah satu kunci dalam merwujudnya dan tercapainya

good governance dalam mengelola organisasi publik.

- Perlunya meningkatkan dan melibatkan sebuah komitmen organisasi terhadap pengendalian intern agar nilai daripada akuntabilitas kinerja menjadi tinggi. Komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi yang mana hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki peran penting sebagai kunci dari keberhasilan pengendalian intern dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi sebuah metode survei melalui penyebaran angket/kuesioner yang sudah dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan dan menghindari respon yang bias atau kesalahan persepsi.

DAFTAR REFERENSI

- Azmi,G., Darwanis., dan Abdullah,S. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4), 1–14.
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2 (01), 89–96.
- Anjarwati, Mei. 2012. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. ISSN: 2252-676.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.)*. Erlangga.
- Dewi, K. F., Widana Putra, A. A. G. , & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(1), 21–33.
- Fitrawati, Kahar, A., dan A, M. I. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (survei pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) kabupaten parigi moutong). *E Jurnal Katalogis*, 5, 177–184.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro.

- Heptariani.Z, S., Rasuli, M., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau). *Sorot*, 8 (1), 32. Repositori Institusi USU. Universitas Sumatera Utara.
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM FEKON*, 04(1), 528–542.
- Kusumaningrum, I. (2010).Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. In *Institutional Repository (UNDIP-IR)*. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Anggaran dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 62–73.
- Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(11), 57–80.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian intern pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- Priansa, D. J. 2014. *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Alfabeta.
- Sopiah. 2008. *Prilaku Organisasional*. CV. ANDI OFFSET.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Silalahi, E. B. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. In *Repositori Institusi USU*. Universitas Sumatera Utara
- Syafrial. 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun*. In